

Media sosial dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan: studi kasus rencana perubahan Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi = Social media in the political formation law legislation : a case study plan amendment Act No. 30 of 2002 on the corruption / R Ferdian Andi R

R Ferdian Andi R, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365002&lokasi=lokal>

---

Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas tentang media sosial berupa Twitter sebagai saluran baru dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian terungkap media sosial mampu membentuk opini publik yang mampu memengaruhi politik hukum pembuat undang-undang. Ini terbukti saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada akhirnya, media sosial membentuk produk hukum populis.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses social media such as Twitter as a new channel in the public participation in the formation of legislation. From the research revealed social media is able to shape public opinion can influence legal political legislators. This is evident when the House of Representatives (DPR) suspended a change in the law No. 30 of 2002 on Corruption. In the end, social media form a populist legislation.